

PEMBERDAYAAN KOMUNITAS MELALUI FISCAL LITERACY UNTUK MEMINIMALISIR FISCAL ILLUSION DALAM PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DI DAERAH

Siti Sanisah^{1)*}, Sukuryadi²⁾, Nurin Rochayati³⁾, Sri Rejeki⁴⁾, Abdul Kadir⁵⁾, Edi⁶⁾, Palahuddin⁷⁾,
Astagini Putri Kariana⁸⁾, Ratnah⁹⁾, Yulianto Suteja¹⁰⁾

^{1,3,8,9}Program Studi Pendidikan Geografi, Universitas Muhammadiyah Mataram

²Magister Ilmu Lingkungan Pascasarjana, Universitas Muhammadiyah Mataram

⁴Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Muhammadiyah Mataram

⁶Magister Pendidikan Dasar Pascasarjana, Universitas Muhammadiyah Mataram

⁵Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris, Universitas Muhammadiyah Mataram

⁷Program Studi Pendidikan Bahasa Arab, Universitas Muhammadiyah Mataram

¹⁰Program Studi Ilmu Kelautan, Fakultas Pertanian, Universitas Mataram

¹sitanisah25@ummat.ac.id, ²Sukuryadi@ummat.ac.id, ³nurinrochayati@gmail.com, ⁴umi.cici.66@gmail.com,

⁵dirson35@gmail.com, ⁶edi.dompu.80@gmail.com, ⁷falahuddinazain@gmail.com,

⁸astaginiputri85@gmail.com, ⁹ratnahh45@gmail.com, ¹⁰yuliantosuteja@staff.unram.ac.id

Diterima 24 Mei 2026, Direvisi 9 Juni 2026, Disetujui 10 Juni 2026

ABSTRAK

Rendahnya literasi fiskal masyarakat dalam memahami pembiayaan pendidikan di daerah dapat memunculkan *fiscal illusion*, yang berdampak pada rendahnya keterlibatan masyarakat dalam proses evaluasi dan advokasi pembiayaan pendidikan. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan literasi fiskal komunitas pemerhati pendidikan melalui program *fiscal literacy bootcamp* di Kabupaten Lombok Tengah bermitra dengan KLIK Foundation yang melibatkan 25 orang sebagai peserta aktif. Kegiatan dilaksanakan dengan mengintegrasikan pendekatan *participatory action learning and empowerment (PALE) Community-Based Fiscal Literacy*, dengan tahapan pelaksanaan mencakup asesmen partisipatif, penyusunan modul digital interaktif, pelaksanaan *fiscal literacy bootcamp*, pendampingan advokasi berbasis data, refleksi, dan penyusunan rencana tindak lanjut. Berdasarkan nilai *pretest-posttest* yang dilakukan dapat diketahui bahwa hasil pelaksanaan kegiatan pengabdian menunjukkan adanya peningkatan literasi fiskal peserta yang mencakup pemahaman tentang struktur pembiayaan pendidikan di daerah, kemampuan membaca dan menganalisis dokumen anggaran, serta keterampilan menyusun advokasi berbasis data. Penggunaan modul digital interaktif yang dikembangkan juga mendukung pembelajaran yang lebih fleksibel dan aplikatif. Kegiatan ini memperkuat kapasitas komunitas dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas pembiayaan pendidikan di daerah. *Fiscal literacy bootcamp* terbukti efektif sebagai model pemberdayaan komunitas berbasis literasi fiskal pendidikan. Disarankan agar kegiatan serupa dapat dilakukan secara berkelanjutan dan diperluas pada komunitas pendidikan lain agar partisipasi masyarakat dalam pengawasan anggaran pendidikan meningkat.

Kata kunci: *Fiscal Illusion; Literasi Fiskal; Pembiayaan Pendidikan; Pemberdayaan Komunitas; Advokasi Pendidikan.*

ABSTRACT

Low levels of fiscal literacy among the public regarding the financing of education in local areas can lead to a “fiscal illusion,” which results in low public engagement in the evaluation and advocacy processes for education funding. This community service initiative aims to improve the fiscal literacy of the education advocacy community through a fiscal literacy bootcamp program in Central Lombok Regency, in partnership with the KLIK Foundation, involving 25 active participants. The activity was implemented by integrating the Community-Based Fiscal Literacy approach using Participatory Action Learning and Empowerment (PALE), with implementation stages including participatory assessment, development of interactive digital modules, conduct of the fiscal literacy bootcamp, data-driven advocacy mentoring, reflection, and development of a follow-up action plan. Based on the pretest-posttest scores, the community service activity demonstrated an increase in participants’ fiscal literacy, including an understanding of the structure of local education funding, the ability to read and analyze budget documents, and the skill to develop data-driven advocacy. The use of the interactive digital modules also supported more flexible and practical learning. This activity strengthened the community’s capacity to promote transparency

and accountability in local education financing. The fiscal literacy bootcamp proved effective as a model for community empowerment.

Keywords: *Fiscal Illusion; Fiscal Literacy; Education Funding; Community Empowerment; Education Advocacy.*

PENDAHULUAN

Persoalan pembiayaan pendidikan di Indonesia tidak hanya terkait dengan besarnya anggaran yang dialokasikan, tetapi juga berkaitan dengan sejauh mana pemangku kepentingan memahami bagaimana biaya tersebut bergerak: dari mana asalnya, ke mana alirannya, dan siapa yang bertanggung jawab atas penggunaannya. Konstitusi Indonesia mengamanatkan bahwa anggaran pendidikan minimal 20% dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) maupun APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) sebagai bentuk komitmen negara terhadap pembangunan sumber daya manusia (Jaweng et al., 2020; Nursafitri, 2020; Sulasmi et al., 2023). Tetapi, kepatuhan terhadap ketentuan *mandatory spending* tersebut tidak otomatis menjamin bahwa pengelolaan anggaran berlangsung secara transparan, akuntabel, efisien, dan tepat sasaran terutama dalam konteks desentralisasi fiskal di daerah. Faktanya, peningkatan alokasi anggaran pendidikan sering tidak selaras dengan peningkatan mutu tata kelola, keterbukaan informasi publik, dan kapasitas masyarakat dalam memahami kebijakan fiskal pendidikan (Mesiono & Haidir, 2020; Sanisah, 2023). Kondisi ini menyebabkan kesenjangan antara besaran belanja pendidikan dengan mutu layanan pendidikan yang dirasakan masyarakat (Sanisah & Santosa, 2023).

Persoalan tersebut berkaitan erat dengan fenomena *fiscal illusion*, yaitu kondisi ketika masyarakat mengalami distorsi persepsi terhadap biaya nyata pelayanan publik akibat kompleksitas sistem fiskal dan rendahnya keterbukaan informasi anggaran. Konsep *fiscal illusion* menjelaskan bahwa masyarakat sering tidak menyadari beban fiskal yang ditanggung negara maupun kontribusi masyarakat terhadap pembiayaan layanan publik sehingga kontrol sosial terhadap penggunaan anggaran menjadi lemah. Temuan penelitian menunjukkan bahwa rendahnya informasi fiskal menyebabkan masyarakat gagal memahami hubungan antara pajak, pengeluaran publik, dan mutu layanan yang diterima. Studi ini membuktikan bahwa transparansi fiskal dan penyederhanaan informasi anggaran merupakan faktor penting dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap kebijakan publik (Numa, 2025; Parlevliet et al., 2023). Temuan serupa dikemukakan Afonso, (2024), bahwa kompleksitas struktur fiskal daerah sering menjadi penghambat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran pendidikan.

Kabupaten Lombok Tengah sebagai salah satu wilayah strategis di Provinsi Nusa Tenggara Barat menghadapi dinamika pembiayaan pendidikan yang kompleks dalam konteks ekonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Di satu sisi, alokasi anggaran pendidikan secara normatif memenuhi ketentuan *mandatory spending*, baik melalui APBD maupun dukungan dana transfer pusat seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Di sisi lain, persepsi publik terhadap kecukupan, efektivitas, dan keadilan pembiayaan pendidikan didominasi *fiscal illusion*, yaitu kecenderungan individu, kelompok, maupun institusi untuk salah mempersepsi besaran biaya dan manfaat dari kebijakan fiskal publik. Kajian Jackson & Nichols, (2026) menunjukkan bahwa kompleksitas transfer fiskal dan perubahan struktur pembiayaan pendidikan dapat menciptakan ilusi fiskal yang memengaruhi perilaku publik terhadap belanja pendidikan dan pengawasan anggaran. Penelitian tersebut memperlihatkan bahwa ketergantungan pada dana transfer pemerintah dapat mengurangi sensitivitas masyarakat terhadap efisiensi belanja pendidikan.

Dalam praktiknya, pembiayaan pendidikan di Lombok Tengah sering dipersepsikan sebagai layanan “gratis” karena dominasi dana BOS dan subsidi pemerintah daerah. Persepsi ini menimbulkan *fiscal illusion* yang berimplikasi pada rendahnya partisipasi kritis masyarakat dalam pengawasan anggaran, lemahnya kontrol sosial terhadap efektivitas belanja pendidikan, dan terbatasnya ruang dialog antara masyarakat, sekolah, dan pemerintah daerah. Akibatnya, ketimpangan antara besaran anggaran yang tersedia dan kualitas layanan pendidikan yang dirasakan masyarakat menjadi semakin sulit untuk dijelaskan secara rasional oleh masyarakat. Fenomena ini menunjukkan bahwa persoalan utama pembiayaan pendidikan bukan hanya terkait jumlah anggaran, tetapi juga keterbatasan literasi publik terhadap mekanisme fiskal pendidikan dan minimnya ruang partisipasi masyarakat dalam tata kelola pendidikan.

Kondisi tersebut diperparah oleh rendahnya literasi digital dan literasi digital masyarakat pelaku pendidikan, khususnya dalam memahami struktur APBD pendidikan, mekanisme transfer fiskal, indikator kerja anggaran, dan biaya tidak langsung (*hidden cost*) dalam penyelenggaraan pendidikan. Banyak anggota komunitas pemerhati pendidikan belum memiliki kapasitas membaca dokumen

anggaran, mengaitkan belanja pendidikan dengan capaian kinerja sekolah, maupun mengidentifikasi potensi *missallocation* dan inefisiensi anggaran. Penelitian (Rangkuti et al., 2024) menegaskan bahwa keberhasilan desentralisasi fiskal pendidikan sangat dipengaruhi oleh tingkat partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan evaluasi layanan pendidikan. Studi tersebut menunjukkan bahwa rendahnya pemahaman masyarakat terhadap kebijakan fiskal menyebabkan partisipasi publik dalam pengelolaan pendidikan menjadi kurang efektif. Situasi ini menunjukkan bahwa tantangan pembiayaan pendidikan di Lombok Tengah bukan semata soal besaran anggaran, melainkan soal pemahaman, transparansi, dan kapasitas pengawasan publik.

Selain persoalan pemahaman masyarakat, tantangan pembiayaan pendidikan juga berkaitan dengan ketimpangan kapasitas fiskal antarwilayah. Temuan penelitian (Kamal et al., 2025) menunjukkan bahwa disparitas pembiayaan pendidikan di Indonesia dipengaruhi oleh kapasitas fiskal daerah, kualitas tata kelola anggaran, dan kemampuan pemerintah daerah dalam mengalokasikan belanja pendidikan secara adil dan efektif. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa penguatan literasi fiskal masyarakat menjadi penting agar publik mampu memahami hubungan antara kapasitas fiskal daerah dan kualitas layanan pendidikan yang diterima.

Berada di tengah berbagai tantangan tersebut, Lombok Tengah memiliki potensi sosial yang cukup kuat dalam penguatan literasi fiskal pendidikan. Keberadaan komunitas pemerhati pendidikan, jejaring masyarakat sipil, relawan pendidikan, dan partisipasi aktif orang tua menjadi modal sosial penting dalam mendorong pengawasan pembiayaan pendidikan berbasis komunitas. Tingginya kepedulian masyarakat terhadap isu akses, mutu, dan keadilan pendidikan menjadi potensi strategis untuk dikembangkan melalui pendekatan pemberdayaan berbasis literasi fiskal. Secara kelembagaan, keberadaan komunitas seperti KLIK Foundation menunjukkan adanya aktor non-pemerintah yang memiliki legitimasi sosial, pengalaman advokasi pendidikan, dan kedekatan dengan masyarakat sekolah. Potensi ini sangat relevan untuk mentransformasikan isu pembiayaan pendidikan dari sekedar persoalan teknokratis menjadi isu publik yang partisipatif dan berbasis data.

Meski memiliki kepedulian tinggi, mitra dan sasaran juga menghadapi kendala struktural dan kapasitas. Pemahaman teknis mengenai fiskal daerah dan pembiayaan pendidikan masih terbatas sehingga aktivitas advokasi cenderung bersifat normatif dan belum berbasis analisis anggaran yang kuat. Diskusi publik tentang pendidikan cenderung fokus pada isu sarana, kesejahteraan guru, dan bantuan pendidikan, tanpa disertai pemahaman mendalam tentang

bagaimana anggaran direncanakan, didistribusikan, dan dievaluasi. Minimnya akses terhadap data anggaran yang mudah dipahami, rendahnya kemampuan analisis dokumen kebijakan, serta belum terbangunnya ruang pembelajaran bersama antara komunitas, sekolah, dan pemerintah daerah menjadi kendala nyata dalam mengurangi *fiscal illusion*.

Mitra juga menghadapi tantangan keberlanjutan program advokasi karena belum adanya model penguatan kapasitas yang sistematis dan terstruktur dalam bidang literasi fiskal pendidikan. Hasil penelitian Burnett & Jones, (2025) menegaskan bahwa kompleksitas informasi keuangan merupakan penghambat utama partisipasi masyarakat dalam proses penganggaran. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan edukatif yang dapat menyederhanakan informasi fiskal agar dapat dipahami oleh masyarakat secara luas.

Mitra dalam pengabdian kepada masyarakat ini adalah komunitas KLIK Foundation yang merupakan komunitas pemerhati pendidikan di Kabupaten Lombok Tengah. Komunitas ini aktif dalam kegiatan pendampingan masyarakat, diskusi publik, advokasi kebijakan pendidikan, dan penguatan kesadaran sosial tentang hak atas pendidikan yang berkualitas. Komunitas ini memiliki basis anggota yang terdiri dari relawan pendidikan, pendidik, aktivis komunitas, dan tokoh masyarakat yang memiliki kepedulian tinggi terhadap isu-isu pendidikan lokal. Sebagai mitra, KLIK Foundation memiliki keunggulan dalam hal kedekatan dengan masyarakat, kemampuan memobilisasi komunitas, dan pengalaman mengelola kegiatan berbasis partisipasi. Tetapi, KLIK Foundation membutuhkan penguatan kapasitas substantif dalam aspek literasi fiskal dan analisis pembiayaan pendidikan agar peran advokasinya menjadi lebih efektif, berbasis data, dan mampu memengaruhi praktik pengelolaan pendidikan di tingkat lokal secara lebih efektif.

Program *Fiscal Literacy Bootcamp* secara langsung berkontribusi pada pencapaian SDG'S 4 (Pendidikan Berkualitas) melalui penguatan tata kelola, efektivitas, dan transparansi pembiayaan pendidikan. Kegiatan juga mendukung SDG 16 (Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh) dengan mendorong transparansi anggaran, partisipasi publik, dan penguatan institusi sosial dalam pengawasan kebijakan pendidikan (Jasińska & Guei, 2022). Temuan penelitian Archer, (2026) menjelaskan bahwa pembiayaan pendidikan yang berkeadilan membutuhkan keterlibatan masyarakat dalam mengawasi alokasi dan penggunaan sumber daya publik. Dalam konteks Asta Cita, kegiatan ini sejalan dengan agenda penguatan sumber daya manusia, pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif, serta pemberdayaan masyarakat sebagai subjek pembangunan. Literasi fiskal

pendidikan diposisikan sebagai instrumen strategis untuk membangun warga negara yang kritis, partisipatif, dan mampu berkontribusi dalam pembangunan pendidikan berkelanjutan.

Pendekatan *bootcamp* dirancang tidak hanya sebagai pelatihan satu arah, tetapi sebagai ruang pembelajaran kolektif yang mengintegrasikan diskusi, simulasi anggaran, studi kasus lokal, dan refleksi kebijakan. Kegiatan diharapkan dapat menghasilkan perubahan paradigma dari sekedar penerimaan anggaran menuju pemahaman kritis tentang nilai, konsekuensi, dan tanggung jawab fiskal dalam pendidikan. Analisis situasi ini menegaskan bahwa intervensi pengabdian kepada masyarakat di Lombok Tengah harus bergerak melampaui pendekatan sosialisasi konvensional, menuju pemberdayaan komunitas yang berbasis pengetahuan, data, dan kesadaran fiskal, sebagai prasyarat utama untuk mengatasi *fiscal illusion* dalam pembiayaan pendidikan di daerah.

Kegiatan pengabdian bertujuan untuk memberdayakan komunitas pendidikan di Lombok Tengah melalui peningkatan literasi fiskal kritis dan aplikatif, sehingga mampu memahami, mengawasi, dan berpartisipasi secara bermakna dalam pembiayaan pendidikan di daerah. Secara khusus, kegiatan diarahkan untuk meningkatkan pemahaman mitra dan komunitas sasaran tentang konsep *fiscal illusion*, struktur pembiayaan pendidikan di daerah, serta keterkaitannya dengan kinerja dan kualitas layanan pendidikan. Kegiatan ini juga bertujuan untuk membangun kapasitas advokasi berbasis data anggaran, mendorong dialog konstruktif antara masyarakat dan pemangku kebijakan, serta memperkuat peran komunitas sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pembiayaan pendidikan yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan.

METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan di Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan mitra utama KLIK Foundation sebagai komunitas pemerhati pendidikan yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat dan advokasi pendidikan lokal. Sasaran kegiatan sebanyak 25 orang yang terdiri atas anggota komunitas, relawan pendidikan, dan masyarakat yang memiliki perhatian terhadap tata kelola pembiayaan pendidikan di daerah. Kegiatan dilakukan dalam bentuk pelatihan intensif dan pendampingan bertempat di Sekretariat TKPKD (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah) Kabupaten Lombok Tengah.

Pengabdian dilakukan dengan pendekatan *Participatory Action Learning and Empowerment (PALE)*, sering disebut *Participatory Learning and*

Action (PLA) (Darmawan et al., 2020) dipadukan dengan *Community-Based Fiscal Literacy Approach* (Rahayu, 2024). Pendekatan tersebut dipilih karena menempatkan mitra sebagai subjek aktif dalam pembelajaran, penyelesaian masalah, refleksi kritis, aksi berbasis data, dan perbaikan berkelanjutan (Anggraini et al., 2025), sehingga relevan untuk menanggulangi fenomena *fiscal illusion* dalam pembiayaan pendidikan di daerah. Pendekatan juga mengintegrasikan prinsip *adult learning* (andragogi), *experiential learning*, dan *problem-based learning*, yang terbukti efektif meningkatkan literasi kebijakan dan kapasitas advokasi komunitas. Melalui pendekatan ini, peserta tidak hanya menerima materi secara teoritis, tetapi juga terlibat langsung dalam proses identifikasi masalah, analisis data anggaran, diskusi kebijakan, dan penyusunan strategi advokasi berbasis kebutuhan lokal. Pendekatan partisipatif efektif meningkatkan kapasitas komunitas karena memungkinkan terjadinya proses pembelajaran kolektif yang kontekstual dan berkelanjutan.

Tahapan pelaksanaan kegiatan pengabdian dengan pendekatan integratif *PALE-Community-Based Fiscal Literacy Approach* seperti Gambar 1.



Gambar 1. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian

Gambar 1 menunjukkan bahwa hal pertama yang harus dilakukan adalah asesmen partisipatif dan pemetaan kebutuhan bersama mitra (KLIK Foundation). Tahap ini bertujuan untuk mengidentifikasi tingkat literasi fiskal awal, bentuk *fiscal illusion*, isu prioritas pembiayaan pendidikan di daerah, dan kebutuhan serta kesiapan komunitas mengikuti program *bootcamp*. Hasil asesmen menjadi dasar dalam menentukan desain materi, metode pelatihan dan pendekatan pendampingan yang sesuai dengan kondisi lokal masyarakat. Kedua, penyusunan modul digital interaktif literasi fiskal pendidikan. Modul disusun kolaboratif oleh tim pengabdian bersama mitra secara kontekstual, berbasis kasus lokal, disesuaikan dengan kebutuhan komunitas serta hasil asesmen kebutuhan.

Ketiga, pelaksanaan *Fiscal Literacy Bootcamp* secara intensif dan interaktif. Kegiatan meliputi ceramah interaktif, diskusi kelompok, simulasi telaah dokumen anggaran pendidikan, studi kasus pembiayaan pendidikan di Lombok Tengah, refleksi kelompok, dan presentasi hasil kerja peserta. Metode dirancang untuk mendorong refleksi kritis peserta terhadap praktik pembiayaan pendidikan yang selama ini dipahami. Dalam simulasi, peserta dilatih membaca dokumen anggaran pendidikan sederhana, mengidentifikasi pola belanja pendidikan, dan menganalisis keterkaitan antara lokasi anggaran dan kualitas layanan pendidikan. Sementara, diskusi kelompok difokuskan pada identifikasi persoalan pembiayaan pendidikan yang dihadapi masyarakat dan kemungkinan strategi penyelesaiannya.

Keempat, pendampingan advokasi berbasis data. Peserta didampingi menerapkan pengetahuan yang diperoleh dalam merumuskan isu advokasi, menyusun argumen berbasis data anggaran, dan merancang strategi dialog dengan pemangku kepentingan pendidikan daerah. Pendampingan dilakukan melalui klinik advokasi, konsultasi kelompok, dan simulasi forum dialog dengan pemangku kebijakan pendidikan. Tujuan tahap ini adalah meningkatkan kemampuan peserta dalam menyampaikan rekomendasi kebijakan secara argumentatif, sistematis, dan berbasis data. Pendampingan juga diarahkan untuk memperkuat kemampuan mitra dalam membangun komunikasi yang konstruktif dengan sekolah dan pemerintah daerah (Dinas Pendidikan).

Kelima, kegiatan refleksi dan penyusunan rencana keberlanjutan, bertujuan untuk mengevaluasi capaian kegiatan, perubahan pemahaman peserta, efektivitas metode pelaksanaan, dan tantangan yang dihadapi selama kegiatan pengabdian berlangsung. Pada tahap ini peserta diminta menyusun rencana tindak lanjut berupa penguatan forum diskusi komunitas, dan pemanfaatan modul digital secara berkelanjutan. Tahap ini penting untuk memastikan bahwa dampak kegiatan pengabdian tidak berhenti setelah kegiatan selesai, tetapi dapat berkembang menjadi gerakan komunitas yang berkelanjutan. Oleh karena itu, keberhasilan kegiatan diukur melalui beberapa indikator seperti pada Tabel 1.

Tabel 1. Indikator Pelaksanaan *Fiscal Literacy Bootcamp*

No	Indikator
1	Pemahaman peserta mengenai struktur pembiayaan pendidikan daerah
2	Kemampuan membaca dan menganalisis dokumen anggaran pendidikan
3	Keterampilan menyusun rekomendasi advokasi berbasis data

4 Kemampuan memanfaatkan modul digital interaktif dalam kegiatan komunitas

Tabel 1 menunjukkan bahwa keberhasilan pelaksanaan *Fiscal Literacy Bootcamp* diukur dengan melakukan evaluasi terhadap empat indikator tersebut. Evaluasi dilakukan melalui observasi partisipatif, refleksi kelompok, penilaian hasil simulasi, dan umpan balik peserta terhadap pelaksanaan kegiatan. Melalui metode pelaksanaan yang berbasis partisipasi, praktik langsung, dan pendampingan komunitas, kegiatan pengabdian diharapkan dapat meningkatkan literasi fiskal masyarakat pemerhati pendidikan. Pada gilirannya diharapkan dapat memperkuat partisipasi publik dalam mewujudkan tata kelola pembiayaan pendidikan di daerah yang lebih transparan, akuntabel, dan berkeadilan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Asesmen Partisipatif dan Pemetaan Kebutuhan

Tahap awal kegiatan pengabdian difokuskan pada asesmen partisipatif untuk memetakan tingkat pemahaman peserta terhadap pembiayaan pendidikan di daerah dan mengidentifikasi bentuk-bentuk *fiscal illusion* yang berkembang di lingkungan komunitas pendidikan di Lombok Tengah. Asesmen dilakukan melalui diskusi awal, wawancara singkat, dan pengumpulan informasi kontekstual terkait praktik pembiayaan pendidikan. Dalam pendekatan pemberdayaan komunitas, asesmen partisipatif menjadi tahapan penting untuk memastikan bahwa intervensi yang dilakukan berbasis kebutuhan mitra dan tidak bersifat *top-down*. Penelitian Burnett & Jones, (2025) dan Jasińska & Guei, (2022) menegaskan bahwa partisipasi aktif masyarakat dalam identifikasi masalah dapat meningkatkan efektivitas program penguatan kapasitas komunitas, khususnya dalam konteks tata kelola keuangan publik. Rerata hasil asesmen peserta terhadap literasi fiskal pendidikan dapat diperhatikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Tingkat Pemahaman Awal Peserta terhadap Literasi Fiskal

No	Indikator	Mean
1	Pemahaman peserta mengenai struktur pembiayaan pendidikan daerah	48,6
2	Kemampuan membaca dan menganalisis dokumen anggaran pendidikan	43,1
3	Keterampilan menyusun rekomendasi advokasi berbasis data	39,8
4	Kemampuan memanfaatkan modul digital interaktif dalam kegiatan komunitas	40,3

Tabel 2 menunjukkan bahwa tingkat pemahaman awal peserta terhadap literasi fiskal pendidikan masih berada dalam kategori rendah hingga sedang. Pemahaman mitra mengenai struktur pembiayaan pendidikan di daerah memperoleh skor rerata sebesar 48,6. Hasil ini mengindikasikan bahwa sebagian besar peserta belum memahami secara utuh bagaimana mekanisme pembiayaan pendidikan bekerja di tingkat daerah, terutama terkait alur APBD pendidikan, mekanisme transfer fiskal dari pemerintah pusat, juga hubungan antara belanja pendidikan dan capaian layanan pendidikan di sekolah. Mayoritas peserta hanya mengenal dana BOS sebagai sumber utama pembiayaan pendidikan, tanpa memahami adanya skema pembiayaan lain seperti DAU, DAK, belanja daerah sektor pendidikan, maupun kontribusi masyarakat dalam mendukung layanan pendidikan.

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa struktur pembiayaan pendidikan masih dipersepsikan sebagai sistem yang bersifat teknokratis dan sulit dipahami oleh masyarakat umum. Kompleksitas mekanisme fiskal menyebabkan informasi mengenai pengelolaan anggaran pendidikan cenderung hanya dipahami kalangan birokrasi dan pengelola sekolah, sementara masyarakat sebagai pengguna layanan pendidikan dihadapkan pada keterbatasan akses pemahaman. Temuan Oates, (2024) menyatakan bahwa kompleksitas sistem fiskal dapat menjadi penyebab masyarakat gagal memahami biaya nyata pelayanan publik sehingga kesadaran terhadap pengawasan anggaran menjadi rendah. Penelitian tersebut menegaskan bahwa rendahnya literasi fiskal berimplikasi langsung terhadap lemahnya partisipasi masyarakat dalam evaluasi kebijakan publik.

Hasil asesmen juga menunjukkan bahwa kemampuan peserta membaca dan menganalisis dokumen anggaran pendidikan masih terbatas, dengan rerata skor 43,1. Sebagian besar peserta mengaku belum pernah membaca dokumen APBD pendidikan atau laporan penggunaan anggaran sekolah secara sistematis. Peserta juga mengalami kesulitan memahami istilah teknis dalam dokumen anggaran, seperti belanja langsung, belanja tidak langsung, indikator kinerja, efisiensi anggaran, dan realisasi belanja. Akibatnya, masyarakat kesulitan menghubungkan antara besarnya anggaran pendidikan dengan kualitas layanan pendidikan yang dirasakan sehari-hari.

Keterbatasan kapasitas analisis anggaran dapat berdampak pada rendahnya kemampuan masyarakat dalam melakukan kontrol sosial terhadap penggunaan anggaran pendidikan. Padahal, dalam konteks desentralisasi fiskal, masyarakat memiliki posisi strategis sebagai pengawas sekaligus mitra pemerintah dalam memastikan penggunaan anggaran berjalan efektif dan tepat sasaran. Rangkuti et al.,

(2024) dan Yusuf & Hidayat, (2023) menjelaskan bahwa rendahnya kapasitas masyarakat dalam memahami anggaran di daerah menjadi salah satu penyebab lemahnya partisipasi publik dalam pengawasan layanan pendidikan. Kondisi ini menjadi dasar kerangka pikir logis urgensi penguatan literasi fiskal masyarakat dalam menciptakan tata kelola pendidikan yang partisipatif dan akuntabel.

Aspek yang memperoleh skor paling rendah adalah keterampilan peserta dalam menyusun rekomendasi advokasi berbasis data yaitu 39,8. Temuan ini menunjukkan bahwa aktivitas advokasi pendidikan yang dilakukan masyarakat selama ini masih bersifat normatif dan belum didukung kemampuan membaca data anggaran maupun analisis kebijakan pendidikan secara memadai. Sebagian besar peserta mengaku lebih sering menyampaikan kritik terhadap layanan pendidikan secara umum tanpa memiliki dasar data fiskal yang kuat. Kondisi tersebut menyebabkan advokasi masyarakat cenderung kurang efektif dalam memengaruhi proses pengambilan keputusan dalam kebijakan pendidikan di tingkat lokal.

Temuan asesmen yang juga penting adalah masih kuatnya fenomena *fiscal illusion* dalam persepsi masyarakat pemerhati pendidikan. Sebagian besar peserta memandang pendidikan sebagai layanan yang sepenuhnya dibiayai pemerintah sehingga keterlibatan masyarakat dalam pengawasan anggaran dianggap kurang penting. Persepsi tersebut berdampak pada rendahnya kepedulian masyarakat terhadap efektivitas penggunaan anggaran pendidikan dan terbatasnya partisipasi dalam forum evaluasi kebijakan pendidikan. Kondisi ini mencerminkan bagaimana kompleksitas sistem pembiayaan publik dapat menciptakan ilusi fiskal yang melemahkan kesadaran masyarakat terhadap biaya riil pelayanan pendidikan. Afonso, (2024) dan Smith & Randall, (2025) menjelaskan bahwa struktur pembiayaan publik yang kompleks dapat mengurangi transparansi dan melemahkan kontrol sosial masyarakat terhadap pengeluaran pemerintah. Ketergantungan masyarakat terhadap pembiayaan pemerintah dapat memunculkan persepsi keliru mengenai biaya layanan publik dan menurunkan sensitivitas publik terhadap efisiensi belanja pendidikan (Jackson & Nichols, 2026).

Meski demikian, hasil asesmen juga menunjukkan adanya modal sosial yang cukup kuat pada mitra. Sebagian besar peserta memiliki motivasi tinggi untuk meningkatkan pemahaman mengenai pembiayaan pendidikan dan menyatakan kebutuhan terhadap pelatihan yang bersifat praktis, sederhana, dan kontekstual. Peserta berharap memperoleh keterampilan membaca dokumen anggaran, memahami pola belanja sektor pendidikan, dan menyusun strategi advokasi berbasis data yang dapat diterapkan pada komunitas mereka. Tingginya

antusiasme peserta menandakan bahwa masyarakat sebenarnya memiliki kepedulian terhadap kualitas tata kelola pendidikan, tetapi belum memperoleh akses pembelajaran yang memadai mengenai literasi fiskal pendidikan.

Pengembangan Modul Digital Interaktif Literasi Fiskal Pendidikan

Berdasarkan hasil asesmen kebutuhan, tim pengabdian bersama mitra mengembangkan modul digital interaktif literasi fiskal pendidikan sebagai media pembelajaran utama dalam kegiatan *Fiscal Literacy Bootcamp*. Pengembangan modul dilakukan secara partisipatif dengan mempertimbangkan tingkat literasi peserta, kondisi sosial masyarakat, dan karakteristik pembelajaran komunitas di Kabupaten Lombok Tengah. Modul dirancang dalam format digital yang dapat diakses secara daring maupun luring menggunakan perangkat telepon pintar maupun komputer dengan spesifikasi standar. Pemilihan format digital dilakukan dengan maksud memudahkan distribusi, memperluas ruang akses pembelajaran, dan keberlanjutan penggunaan modul pascakegiatan. Pemanfaatan teknologi dalam konteks pemberdayaan masyarakat dinilai berpotensi meningkatkan fleksibilitas pembelajaran sekaligus memperkuat akses masyarakat terhadap sumber pengetahuan yang sebelumnya sulit dijangkau. Penelitian Prasetyo & Lestari, (2022) menegaskan bahwa media pembelajaran digital berbasis komunitas mampu meningkatkan partisipasi belajar masyarakat dan memperkuat kapasitas literasi publik secara lebih inklusif.

Materi dalam modul disusun berdasarkan kebutuhan nyata peserta. Secara substantif, modul mencakup empat pokok bahasan utama, yaitu konsep *fiscal illusion* dalam pembiayaan pendidikan di daerah, struktur pembiayaan pendidikan di daerah, teknik membaca dan menganalisis dokumen anggaran pendidikan, serta strategi advokasi berbasis data anggaran. Materi disusun menggunakan bahasa yang sederhana, komunikatif, dan kontekstual agar mudah dipahami oleh peserta yang berasal dari latar belakang pendidikan yang beragam. Pendekatan penyederhanaan bahasa dan penggunaan contoh lokal dilakukan untuk mengurangi kesan bahwa isu fiskal merupakan persoalan teknokratis yang hanya dapat dipahami oleh birokrasi atau kalangan akademik. Penyederhanaan informasi fiskal merupakan faktor yang penting dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap kebijakan keuangan publik dan memperkuat partisipasi warga dalam pengawasan anggaran (Chen & Neshkova, 2019; Oates, 2024).

Dalam upaya meningkatkan efektivitas pembelajaran, modul dilengkapi dengan berbagai fitur interaktif seperti infografik alur pembiayaan pendidikan, template analisis anggaran sederhana,

studi kasus lokal, kuis reflektif, dan latihan simulasi. Visualisasi data dapat membantu peserta memahami hubungan antara sumber dana, alokasi anggaran, dan kualitas layanan pendidikan secara lebih konkret dan sistematis. Visualisasi juga dapat mempermudah peserta mengidentifikasi proses distribusi anggaran pendidikan mulai dari pemerintah pusat hingga satuan pendidikan. Simulasi dan *template* analisis anggaran memberikan pengalaman belajar yang lebih aplikatif sehingga peserta dapat memahami konsep secara teoritis, sekaligus memiliki kemampuan praktis dalam membaca dan mengevaluasi dokumen anggaran pendidikan. Temuan penelitian Mai et al., (2025) dan Islam, (2025) menyimpulkan bahwa penggunaan media pembelajaran berbasis praktik dan simulasi dapat meningkatkan kemampuan analisis peserta dalam memahami pengelolaan pembiayaan pendidikan secara lebih efektif.

Penggunaan studi kasus lokal menjadi salah satu kekuatan utama modul digital interaktif. Studi kasus diambil dari pengalaman pengelolaan pembiayaan pendidikan di beberapa sekolah di Lombok Tengah sehingga materi pembelajaran lebih dekat dengan realitas yang dihadapi peserta. Pendekatan kontekstual penting untuk membangun kesadaran kritis masyarakat terhadap persoalan pembiayaan pendidikan di lingkungan sekitar. Selain mempelajari teori transparansi dan akuntabilitas anggaran, peserta diajak menganalisis bagaimana dampak kebijakan pembiayaan pendidikan terhadap kualitas layanan pendidikan di daerah. Penelitian Yusuf & Hidayat, (2023) menegaskan bahwa pembelajaran berbasis konteks lokal mampu meningkatkan keterlibatan peserta dan memperkuat keberhasilan program pemberdayaan masyarakat.

Pengembangan modul digital menjadi salah satu inovasi utama dalam kegiatan pengabdian karena berfungsi sebagai media transfer pengetahuan, dan instrumen pemberdayaan komunitas dalam melakukan analisis dan advokasi pembiayaan pendidikan secara mandiri. Modul didesain agar dapat digunakan secara berkelanjutan oleh komunitas setelah kegiatan *bootcamp* selesai. Keberadaan modul sangat penting untuk memperluas akses pengetahuan fiskal sekaligus memperkuat budaya partisipasi masyarakat dalam tata kelola pendidikan daerah. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Burnett & Jones, (2025) bahwa penguatan kapasitas masyarakat melalui media pembelajaran yang mudah diakses merupakan strategi penting dalam membangun partisipasi publik yang lebih substantif terhadap kebijakan anggaran publik.

Pelaksanaan Fiscal Literacy Bootcamp

Pelaksanaan *Fiscal Literacy Bootcamp* dilakukan dengan melibatkan 25 orang peserta yang terdiri dari anggota komunitas KLIK Foundation dan

masyarakat pemerhati pendidikan lainnya. Kegiatan menggunakan pendekatan partisipatif berbasis praktik yang mengintegrasikan pembelajaran konseptual, simulasi analisis anggaran, diskusi kelompok, dan refleksi komunitas. Pemanfaatan pendekatan ini sejalan dengan hasil penelitian Yusuf & Hidayat, (2023) dan Rahayu, (2024) bahwa model pelatihan berbasis praktik dan refleksi komunitas mampu meningkatkan keterlibatan peserta serta memperkuat kapasitas masyarakat dalam memahami isu kebijakan publik secara lebih kritis.

Tahap awal *bootcamp*, peserta diberikan pemahaman mengenai konsep *fiscal illusion* dan implikasinya terhadap tata kelola pembiayaan pendidikan di daerah. Materi ini membuka kesadaran peserta bahwa kualitas pendidikan tidak hanya ditentukan oleh jumlah alokasi anggaran, tetapi juga dipengaruhi efektivitas pengelolaan, transparansi penggunaan anggaran, dan keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan dan evaluasi penggunaan serta kebijakan anggaran pendidikan. Kegiatan dimaksud seperti pada gambar 2.



Gambar 2. Penyampaian Materi tentang *fiscal illusion*

Gambar 2 menunjukkan sesi diskusi awal, dimana sebagian besar peserta mengakui bahwa sebelumnya memang berpikir pendidikan sebagai layanan yang sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah sehingga masyarakat tidak perlu memahami proses pembiayaan maupun penggunaan anggaran pendidikan. setelah memperoleh penjelasan mengenai konsep *fiscal illusion*, peserta memahami bahwa kompleksitas struktur fiskal dan rendahnya literasi anggaran dapat menyebabkan masyarakat kehilangan sensitivitas terhadap efektivitas belanja pendidikan. kesadaran ini menjadi titik awal perubahan paradigma peserta dari posisi sebagai penerima manfaat pasif menuju warga yang memiliki tanggung jawab sosial dalam mengawasi tata kelola pendidikan. Materi *bootcamp* juga menegaskan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pengawasan anggaran merupakan bagian penting dalam membangun tata kelola pendidikan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan lokal. Oates, (2024) menyatakan bahwa peningkatan

pemahaman masyarakat terhadap mekanisme fiskal publik dapat memperkuat kontrol sosial terhadap kebijakan anggaran dan meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat dalam tata kelola publik.

Tahap berikutnya difokuskan pada simulasi pembacaan dan analisis dokumen anggaran pendidikan sebagai upaya membangun keterampilan praktis peserta dalam memahami tata kelola pembiayaan pendidikan di daerah. Peserta dilatih mengidentifikasi komponen belanja pendidikan, membedakan belanja rutin dan belanja peningkatan mutu, dan menganalisis keterkaitan antara alokasi anggaran dengan capaian layanan pendidikan. Simulasi dilakukan menggunakan contoh dokumen anggaran pendidikan yang disederhanakan dan dikontekstualisasikan dengan kondisi Lombok Tengah sehingga peserta lebih mudah memahami struktur dan alur penggunaan anggaran pendidikan. Dalam proses simulasi, peserta mulai mampu menghubungkan persoalan kualitas layanan pendidikan dengan pola distribusi dan penggunaan anggaran yang diterapkan pemerintah daerah. Hasil penelitian membuktikan bahwa pelatihan berbasis praktik dan simulasi dapat meningkatkan kapasitas masyarakat dalam memahami dan mengevaluasi kebijakan publik secara lebih kritis (Burnett & Jones, 2025; Jasińska & Guei, 2022).

Selain simulasi analisis anggaran, diskusi kelompok menjadi bagian penting dalam *bootcamp* karena memberikan ruang bagi peserta untuk membagi pengalaman dan mendiskusikan persoalan nyata yang dihadapi di lingkungan sekolah dan komunitas masing-masing. Melalui kegiatan diskusi partisipatif, peserta menyadari bahwa berbagai persoalan pendidikan seperti keterbatasan fasilitas, rendahnya kualitas layanan pendidikan, ketimpangan akses, serta kurangnya transparansi penggunaan anggaran memiliki hubungan erat dengan pola pengelolaan pembiayaan pendidikan di daerah seperti tampak pada Gambar 3.



Gambar 3. Diskusi Kelompok

Gambar 3 memperlihatkan aktivitas diskusi kelompok dimana masyarakat mengakui bahwa selama ini cenderung melihat persoalan pendidikan hanya dari aspek teknis pembelajaran, tanpa memahami dimensi fiskal dan kebijakan yang

memengaruhi kualitas layanan pendidikan secara lebih luas. Interaksi antarpeserta dalam forum diskusi menciptakan refleksi kolektif yang memperkuat kesadaran kritis masyarakat mengenai pentingnya keterlibatan publik dalam pengawasan pembiayaan pendidikan. Kondisi ini menggambarkan bahwa pendekatan pembelajaran kolaboratif berbasis pengalaman komunitas mampu meningkatkan kesadaran sosial dan memperkuat kapasitas advokasi masyarakat terhadap kebijakan publik (Efuntade & Efuntade, 2023; Yusuf & Hidayat, 2023).

Akhir pelaksanaan *bootcamp* dilakukan evaluasi terhadap capaian peserta. Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan yang cukup signifikan terhadap kemampuan peserta dalam memahami literasi fiskal pendidikan. Tingkat penguasaan peserta tersebut selengkapnya dapat diperhatikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Hasil Evaluasi Pelaksanaan *Bootcamp*

No	Indikator	Mean
1	Pemahaman peserta mengenai struktur pembiayaan pendidikan di daerah	82,4
2	Kemampuan membaca dan menganalisis dokumen anggaran pendidikan	79,1
3	Keterampilan menyusun rekomendasi advokasi berbasis data	81,6
4	Kemampuan memanfaatkan modul digital interaktif dalam kegiatan komunitas	78,5

Tabel 3 menunjukkan pemahaman peserta mengalami peningkatan pada ketiga aspek. Peningkatan ini merupakan indikasi bahwa metode pembelajaran partisipatif berbasis simulasi dan praktik mampu memperkuat kapasitas peserta dalam memahami hubungan antara kebijakan fiskal dengan kualitas layanan pendidikan. Selain peningkatan aspek kognitif, peserta juga mulai menunjukkan kemampuan mengidentifikasi persoalan pembiayaan pendidikan secara lebih sistematis dan berbasis data. Peserta tidak memandang pembiayaan pendidikan hanya sebagai tanggung jawab pemerintah, tetapi mulai memahami pentingnya peran masyarakat dalam mengawal efektivitas penggunaan anggaran pendidikan. Peningkatan literasi fiskal masyarakat dapat memperkuat partisipasi publik dalam pengawasan layanan pendidikan dan mendorong terciptanya tata kelola pendidikan yang lebih akuntabel (Numa, 2025; Rangkuti et al., 2024).

Selain peningkatan pemahaman dan keterampilan teknis, *bootcamp* juga berdampak pada meningkatnya *self confidence* peserta dalam menyampaikan pendapat dan berdiskusi mengenai isu

pendanaan pendidikan di lingkungan komunitas. Sebelum kegiatan, peserta dominan merasa isu fiskal dan anggaran merupakan persoalan rumit dan hanya dapat dipahami kalangan birokrasi atau akademisi. Setelah mengikuti proses pembelajaran berbasis praktik dan diskusi partisipatif, peserta merasa memiliki kemampuan untuk membaca informasi anggaran, mengkritisi kebijakan pembiayaan pendidikan, dan menyampaikan rekomendasi advokasi secara lebih argumentatif. Perubahan ini menunjukkan bahwa penguatan literasi fiskal tidak hanya meningkatkan pengetahuan masyarakat, tetapi juga memperkuat kapasitas sosial dan partisipasi warga dalam tata kelola pendidikan di daerah. Capaian ini berpotensi memperkuat kontrol sosial dan mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan partisipatif (Afonso, 2024; Mohangi & Nyika, 2023; Siahay et al., 2025).

Penguatan Advokasi Berbasis Data Anggaran

Setelah mengikuti pelatihan, peserta didampingi menyusun strategi advokasi berbasis data anggaran pendidikan. Pendampingan dilakukan melalui klinik advokasi dan simulasi forum dialog komunitas dengan pemangku kepentingan kebijakan pendidikan di daerah Lombok Tengah. Pada tahap ini, peserta diarahkan untuk menggunakan data dan hasil analisis anggaran sebagai dasar identifikasi persoalan prioritas pendidikan, menyusun argumentasi kebijakan, dan menyampaikan aspirasi masyarakat secara lebih sistematis dan berbasis bukti. Peserta juga dilatih menghubungkan antara alokasi belanja pendidikan dengan persoalan di lapangan, seperti ketimpangan fasilitas belajar, keterbatasan sarana pendidikan, efektivitas penggunaan dana BOS dan rendahnya transparansi penggunaan anggaran di sekolah. Pendekatan ini bertujuan mengubah pola advokasi masyarakat yang sebelumnya dominan bersifat normatif dan emosional menjadi advokasi yang berbasis data, rasional, dan konstruktif (Suriadi & Karim, 2025; Zaini, 2025). Dalam konteks tata kelola pendidikan, kemampuan masyarakat membaca dan memanfaatkan data anggaran menjadi penting dalam memperkuat partisipasi publik terhadap proses penentuan kebijakan, memperkuat kualitas partisipasi publik, serta memperkuat akuntabilitas kebijakan publik dalam konteks pendidikan (Burnett & Jones, 2025; Sanisah, 2022).

Hasil pendampingan menunjukkan bahwa peserta mulai mampu mengidentifikasi isu prioritas pembiayaan pendidikan yang relevan dengan kondisi Lombok Tengah. Isu yang berhasil dipetakan peserta yaitu ketimpangan distribusi fasilitas pendidikan antarwilayah, minimnya transparansi laporan penggunaan dana di sekolah, rendahnya keterlibatan masyarakat dalam forum evaluasi pendidikan, serta belum optimalnya alokasi anggaran peningkatan mutu

pembelajaran. Peserta juga mampu menyusun argumentasi yang lebih sistematis dan berbasis bukti dibandingkan sebelumnya. Ketika presentasi hasil simulasi, peserta menjelaskan bahwa selama ini peserta cenderung menyampaikan kritik secara umum tanpa dukungan data yang kuat, setelah pendampingan mulai menggunakan informasi anggaran, hasil analisis belanja pendidikan, dan indikator capaian layanan sebagai dasar dalam menyusun rekomendasi advokasi, seperti tampak pada Gambar 4.



Gambar 4. Presentasi Hasil Simulasi Advokasi

Gambar 4 menggambarkan bahwa perubahan kemampuan ini menjadi indikator penting bahwa literasi fiskal dapat meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap anggaran, dan memperkuat kapasitas advokasi komunitas dalam mengawal tata kelola pendidikan di tingkat daerah. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang menegaskan bahwa peningkatan kapasitas masyarakat dalam memahami anggaran publik dapat memperkuat partisipasi warga dalam pengawasan layanan pendidikan dan meningkatkan efektivitas tata kelola pendidikan di daerah (Digdowiseiso et al., 2020; Pebriyanti & Aliyyah, 2024; Rangkuti et al., 2024).

Penguatan advokasi berbasis data ini juga berkontribusi terhadap meningkatnya kesadaran kolektif masyarakat mengenai pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pembiayaan pendidikan. Melalui proses pendampingan, peserta memahami bahwa keterlibatan masyarakat dalam pengawasan anggaran bukan merupakan bentuk oposisi terhadap pemerintah, tetapi bagian dari tanggung jawab sosial untuk memastikan bahwa sumber daya publik digunakan secara efektif, adil, dan tepat sasaran. Kesadaran tersebut mendorong perubahan posisi komunitas dari sekedar menerima kebijakan menjadi mitra kritis dalam proses pengawasan dan evaluasi penggunaan anggaran pendidikan. Dalam perspektif *fiscal illusion*, Afonso, (2024) dan Frank, (2025) menyatakan bahwa peningkatan literasi fiskal dapat mengurangi distorsi persepsi masyarakat terhadap pembiayaan layanan publik dan memperkuat sensitivitas warga terhadap kualitas pengelolaan anggaran pendidikan.

Refleksi dan Penyusunan Rencana Keberlanjutan

Tahap refleksi dan penyusunan rencana keberlanjutan dilakukan sebagai upaya memastikan dampak pengabdian dapat berlanjut setelah kegiatan selesai. Kegiatan refleksi dilakukan melalui diskusi evaluatif bersama peserta dan mitra untuk menilai perubahan pemahaman, pengalaman belajar, serta manfaat program terhadap kapasitas komunitas. Hasil refleksi menunjukkan bahwa sebagian besar peserta mengalami perubahan positif dalam konteks perspektif terhadap pembiayaan pendidikan terutama di tingkat daerah. Jika sebelumnya peserta cenderung memandang pendidikan sebagai tanggung jawab penuh pemerintah (pusat dan daerah), setelah mengikuti kegiatan *bootcamp* peserta sudah mulai memahami bahwa masyarakat juga memiliki peran penting dan strategis dalam mengawasi penggunaan anggaran dan memastikan belanja pendidikan benar-benar berdampak pada kualitas layanan pendidikan yang diterima oleh masyarakat. Peserta juga menyadari bahwa transparansi anggaran dan keterlibatan masyarakat merupakan bagian penting dari tata kelola pendidikan yang demokratis.

Selain perubahan pemahaman, refleksi juga menunjukkan peningkatan kepercayaan diri peserta dalam melakukan analisis sederhana terhadap anggaran pendidikan dan menyampaikan aspirasi berbasis data. Peserta menyatakan bahwa penggunaan modul digital interaktif dan simulasi praktik selama *bootcamp* membantu memahami isu fiskal yang sebelumnya dianggap rumit dan sulit dipahami. Bersama KLIK Foundation, peserta menyusun rencana keberlanjutan program yang meliputi pembentukan forum diskusi rutin komunitas, pemanfaatan modul digital sebagai media edukasi berkelanjutan, serta pengembangan kelompok kerja advokasi pembiayaan pendidikan di Kabupaten Lombok Tengah. Forum ini dirancang sebagai ruang berbagi informasi, refleksi kebijakan pendidikan, dan koordinasi advokasi komunitas terhadap isu pembiayaan pendidikan di daerah. Keberlanjutan program juga diperkuat melalui komitmen KLIK Foundation untuk mengintegrasikan literasi fiskal pendidikan ke dalam kegiatan pendampingan komunitas yang telah berjalan sebelumnya.

Kegiatan pengabdian ini memberikan dampak positif terhadap peningkatan literasi fiskal dan partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pendidikan di daerah. Melalui pendekatan *bootcamp* dan pendampingan berbasis komunitas, peserta memperoleh pemahaman baru mengenai hubungan antara anggaran pendidikan dan kualitas layanan pendidikan yang diterima masyarakat. Kegiatan pengabdian juga memperkuat jejaring sosial dan solidaritas komunitas dalam mengawal isu pendidikan di tingkat daerah. KLIK Foundation sebagai mitra

memperoleh penguatan kapasitas kelembagaan, khususnya dalam aspek advokasi kebijakan pendidikan berbasis data. Modul digital interaktif yang dihasilkan menjadi luaran penting yang dapat digunakan secara berkelanjutan dalam kegiatan edukasi dan pemberdayaan masyarakat.

Keberhasilan pelaksanaan kegiatan pengabdian menunjukkan bahwa penguatan literasi fiskal masyarakat dapat menjadi strategi efektif untuk mengurangi *fiscal illusion* dan mendorong tata kelola pembiayaan pendidikan yang lebih transparan, partisipatif, dan akuntabel. Pendekatan berbasis komunitas yang digunakan dalam kegiatan ini berpotensi direplikasi ke daerah lain yang memiliki karakteristik permasalahan serupa, khususnya dalam konteks penguatan partisipasi politik dalam pengelolaan pendidikan di daerah.

SIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui program *Fiscal Literacy Bootcamp* berhasil meningkatkan kapasitas literasi fiskal komunitas pemerhati pendidikan di Kabupaten Lombok Tengah. Peningkatan pemahaman peserta pada aspek struktur pembiayaan pendidikan di daerah dari rerata skor awal 48,6 menjadi 82,4, kemampuan membaca dan menganalisis dokumen anggaran pendidikan meningkat dari 43,1 menjadi 79,1, dan keterampilan menyusun materi advokasi berbasis data meningkat dari 39,8 menjadi 81,6 setelah kegiatan pengabdian. Peningkatan capaian tersebut menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif berbasis praktik, simulasi analisis anggaran, dan pendampingan komunitas efektif mengurangi *fiscal illusion* dan memperkuat kemampuan masyarakat dalam memahami tata kelola pembiayaan pendidikan di tingkat daerah.

Kegiatan ini memberikan implikasi penting terhadap penguatan partisipasi masyarakat dalam tata kelola pendidikan di daerah yang lebih transparan dan akuntabel. Program ini menunjukkan bahwa literasi fiskal dapat menjadi instrumen strategis dalam membangun kesadaran kritis masyarakat terhadap hubungan antara anggaran pendidikan dengan kualitas layanan publik. Kegiatan serupa perlu dikembangkan secara berkelanjutan melalui kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah daerah, dan komunitas masyarakat sipil. Penggunaan modul digital interaktif dan pendekatan *community-based fiscal literacy* juga direkomendasikan untuk direplikasi pada komunitas pendidikan lain, sehingga kapasitas masyarakat dalam melakukan pengawasan dan advokasi pembiayaan pendidikan dapat semakin meluas dan berkelanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Disampaikan terima kasih kepada pihak

yang sudah mendukung pelaksanaan dan publikasi hasil pengabdian kepada masyarakat ini, yaitu komunitas KLIK Foundation dan Universitas Muhammadiyah Mataram.

DAFTAR RUJUKAN

- Afonso, W. B. (2024). Fiscal Illusion in State and Local Finances: A Hindrance to Transparency. *State and Local Government Review*, 46(3), 219–228. <https://doi.org/10.1177/0160323X14550103>
- Anggraini, J., Kutanto, H., & Halim, R. (2025). From Digital Skills to Community Empowerment. *The 7th International Conference on Community Development (ICCD) 2025 "Leveraging Digital Technologies and Innovative Product for Sustainable Community,"* 1, 584–589. <https://doi.org/10.33068/iccd.v7i1.916>
- Archer, D. (2026). Delivering the Financing Needed to Progressively Realize the Right to Education. *Frontiers in Education*, 10, 1674739. <https://doi.org/10.3389/educ.2025.1674739>
- Burnett, B. D., & Jones, P. A. (2025). Addressing Barriers to Participatory Budgeting in a Higher Education Context. *Public Finance and Management*, 24(3–4), 148–154. <https://doi.org/10.1177/152397212513677>
- Chen, C., & Neshkova, M. I. (2019). The Effect of Fiscal Transparency on Corruption: A Panel Cross-Country Analysis. *Public Administration*, 98(1), 226–243. <https://doi.org/10.1111/padm.12620>
- Darmawan, D., Alamsyah, T. P., & Rosmilawati, I. (2020). Participatory Learning and Action untuk Menumbuhkan Quality of Life pada Kelompok Keluarga Harapan di Kota Serang. *Journal of Nonformal Education and Community Empowerment*, 4(2), 160–169. <https://doi.org/10.15294/pls.v4i2.41400>
- Digdowiseiso, K., Sugiyanto, E., & Setiawan, H. D. (2020). Fiscal Decentralisation and Inequality in Indonesia. *Ekonomika Regiona [Economy of Region]*, 16(3), 989–1002. <https://doi.org/10.17059/ekon.reg.2020-3-24>
- Efuntade, A. O., & Efuntade, O. O. (2023). Relevance of Fiscal Illusion Proposition and Wagner Theory to Nigerian Budget Performance (Nexus Among Fiscal Illusion Index, Recurrent and Capital Budget). *Journal of Accounting and Financial Management E-ISSN*, 9(3), 129–149. <https://doi.org/10.56201/jafm.v9.no3.2023.pg129.149>
- Frank, A. (2025). Budgeting Strategies for Public Schools. *NIJCIAM: Newport International Journal of Current Issues in Arts and Management*, 6(1), 51–57. <https://doi.org/10.59298/NIJCIAM/2025/6.1.515>

- 7
- Islam, S. (2025). A Systematic Review of Public Budgeting Strategies in Developing Economies: Tools for Transparent Fiscal Governance. *American Journal of Advanced Technology and Engineering Solutions*, 01(01), 602–635. <https://doi.org/10.63125/wm547117>
- Jackson, J., & Nichols, K. (2026). The Grand (Fiscal) Illusion: Property Tax Relief and Education Spending in North Dakota. *Public Finance Review*, 54(4), 586–615. <https://doi.org/10.1177/10911421251384367>
- Jasińska, M., & Guei, K. M. (2022). Public Participation and Transparency in Educational Governance: Implications for Sustainable Development Goals. *Sustainability*, 14(19), 12471. <https://doi.org/10.3390/su141912471>
- Jaweng, R. N. E., Ramda, E. E., Suparman, H. N., Hasibuan, S. N., Mangiri, D., & Tambunan, M. (2020). Realokasi Anggaran dan Penyesuaian (Refocusing) Program : Tantangan dan Respons Pemerintah Daerah Hadapi Pandemi. In *United Cities and Local Governments Asia-Pacific (UCLG ASPAC) & APEKSI*.
- Kamal, S. A. ., Ahmad, M., & Rochimah, H. (2025). Indeks Keadilan Pembiayaan Pendidikan Antarprovinsi di Indonesia: Analisis Disparitas dan Implikasi Kebijakan Pendidikan Nasional. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Citra Bakti*, 12(4), 1041–1052. <https://doi.org/10.38048/jipcb.v12i4.5912>
- Mai, I., Hizir, & Niswanto. (2025). Optimizing Financial Management for Enhanced Educational Outcomes : A Case Study of Public High Schools in Aceh Barat Daya. *Mediterranean Journal of Basic and Applied Sciences (MJBAS)*, 9(1), 1–11. <https://doi.org/10.46382/MJBAS.2025.9101>
- Mesiono, & Haidir. (2020). Manajemen Pembiayaan Pendidikan (Analisis Konsep dan Implikasinya Terhadap Peningkatan Mutu Pendidikan). *Jurnal Hikmah*, 17(2), 61–73.
- Mohangi, P., & Nyika, F. (2023). Performance Management Implementation in Local Government: Lessons from Recent International Literature. *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)*, 13(1), 75–86. <https://doi.org/10.31289/jap.v13i1.9520>
- Numa, K. (2025). Fiscal Illusion at the Individual Level. *Public Choice*, 203. <https://doi.org/10.1007/s11127-024-01187-9>
- Nursafitri. (2020). *Sumber dan Pengeluaran Pembiayaan Pendidikan di Indonesia*. February, 0–14.
- Oates, W. E. (2024). Fiscal Illusion at the Individual Level. *International Tax and Public Finance*, 31(4), 877–896. <https://doi.org/10.1007/s11127-024-01187-9>
- Parlevliet, J., Giuliadori, M., & Rooduijn, M. (2023). Populist Attitudes, Fiscal Illusion and Fiscal Preferences: Evidence from Dutch Households. *Public Choice*, 197(1), 201–225. <https://doi.org/10.1007/s11127-023-01101-9>
- Pebriyanti, D., & Aliyyah, R. R. (2024). Manajemen Keuangan: Pengelolaan Dana bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Sekolah Dasar. *Karimah Tauhid*, 3(3), 2716–2737.
- Prasetyo, H., & Lestari, D. (2022). Digital Literacy and Educational Governance in Local Communities. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 7(3), 201–214. <https://doi.org/10.24832/jpnk.v7i3.2987>
- Rahayu, W. (2024). Improving Financial Literacy For Low-Income Communities Through Financial Coaching. *Digital Bisnis : Jurnal Publikasi Ilmu Manajemen Dan E-Commerce*, 3(4), 290–295. <https://doi.org/10.30640/digital.v3i4.3900>
- Rangkuti, M. R., Sihombing, M., Kusmanto, H., & Ridho, H. (2024). Fiscal Decentralization and Community Participation in Education Services in Deli Serdang Regency, Indonesia. *International Journal of Sustainable Development and Planning*, 19(5), 1639–1653. <https://doi.org/10.18280/ijstdp.190502>
- Sanisah, S. (2022). Pelaksanaan Formulasi Kebijakan Anggaran Pendidikan. *Geography*, 10(1), 81–91.
- Sanisah, S. (2023). *Budget Policy in Education* (1st ed.). Deepublish: Yogyakarta.
- Sanisah, S., & Santosa, H. (2023). Education Budget Fluctuation and Its Relevance to the Achievement of Human Development Index on the Dimension of Education. *Jurnal Kependidikan: Jurnal Hasil Penelitian Dan Kajian Kepustakaan Di Bidang Pendidikan, Pengajaran, Dan Pembelajaran*, 9(1), 140–150. <https://doi.org/10.33394/jk.v9i1.7041>
- Siahay, A. Z. D., Sutisna, E., Khasanah, J. S. N., & Dwianto, A. (2025). Legal, Managerial, and Political Drivers of Governance Performance: An Accounting-Based Analysis of Decentralized Fiscal Autonomy. *International Journal of Innovative Research and Scientific Studies*, 8(5), 1009–1022. <https://doi.org/10.53894/ijirss.v8i5.8925>
- Smith, J., & Randall, P. (2025). Addressing Barriers to Participatory Budgeting in a Higher Education Context. *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*, 37(2), 115–132. <https://doi.org/10.1177/15239721251367755>
- Sulasmii, E., Prasetya, I., & Rahman, A. A. (2023). Government Policy Regarding Education Budget on The Posture of The State Budget (APBN). *Journal for Lesson and Learning Studies*, 6(1), 142–151. <https://doi.org/10.23887/jlls.v6i1.60171>
- Suriadi, I., & Karim, H. A. (2025). Challenges and Effective Strategies in Managing Education

- Financing. *Internasional Conference on Management of Islamic Education (ICMIE)*, 20, 59–72. <https://doi.org/10.30983/icmie/>
- Yusuf, M., & Hidayat, T. (2023). Community Empowerment Through Educational Participation in Rural Indonesia. *Journal of Community Development Research*, 16(2), 88–101. <https://doi.org/10.14456/jcdr-hs.2023.8>
- Zaini, Z. al H. (2025). Effectiveness of Education Financing Management in Public and Private Schools : Policy Perspective and Implementation. *Al-Ishlah: Jurnal Pendidikan*, 17(2), 2331–2344. <https://doi.org/10.35445/alishlah.v17i2.7225>